

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara berkembang mengakui investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik investasi asing maupun domestik menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Crespo & Fontoura, 2007). Investasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga stabilitas ekonomi agar tetap dinamis. Dengan adanya alokasi modal yang tepat pada berbagai sektor pembangunan, investasi mampu memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata (Sargsyan & Kalantaryan, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tercatat 81 proyek investasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan total mencapai Rp239 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup beragam sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, infrastruktur, pangan, pertanian, pariwisata, kawasan industri, hingga energi terbarukan yang ditujukan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Liputan6, 2024). Salah satu proyek investasi yang saat ini tengah berkembang adalah Pembangunan Pulau Rempang *Eco City* di Kota Batam. Pembangunan Pulau Rempang *Eco City* merupakan bentuk kerja sama investasi yang melibatkan partisipasi investor asing, dengan tujuan mewujudkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan

(Fatmawati, 2024).

Seiring kemajuan zaman, aktivitas investasi tidak lagi terbatas dalam lingkup nasional, melainkan telah meluas ke pasar internasional. Globalisasi telah membuka peluang bagi negara berkembang untuk terhubung dengan perekonomian dunia, menghapus berbagai hambatan perdagangan, dan memungkinkan negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang guna memperkuat pertumbuhan ekonomi bersama (Hamdi, 2013). Pembangunan Rempang Eco City di Kota Batam mencerminkan dampak globalisasi terhadap aktivitas investasi di Indonesia. Globalisasi memberikan peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, yang sekaligus menimbulkan pengaruh pada aspek budaya, ekonomi, dan perdagangan. Fenomena ini memungkinkan negara berkembang untuk berintegrasi dengan pasar global serta menarik arus investasi asing (Fadhluraman dkk., 2024).

Kota Batam merupakan salah satu tujuan investasi paling potensial di Indonesia, berkat posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional serta pertumbuhan infrastruktur yang pesat. Faktor-faktor seperti kemudahan perizinan usaha dan peningkatan kualitas layanan publik turut memperkuat daya saing daerah ini sebagai pusat investasi unggulan. Keunggulan ini tercermin dari terus berkembangnya kawasan industri serta peningkatan nilai investasi setiap tahunnya (BP Batam, 2024). Salah satu target investasi utama di Kota Batam adalah pengembangan Pulau Rempang dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang. Akselerasi pengembangan Wilayah Rempang nantinya diharapkan bisa ikut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi

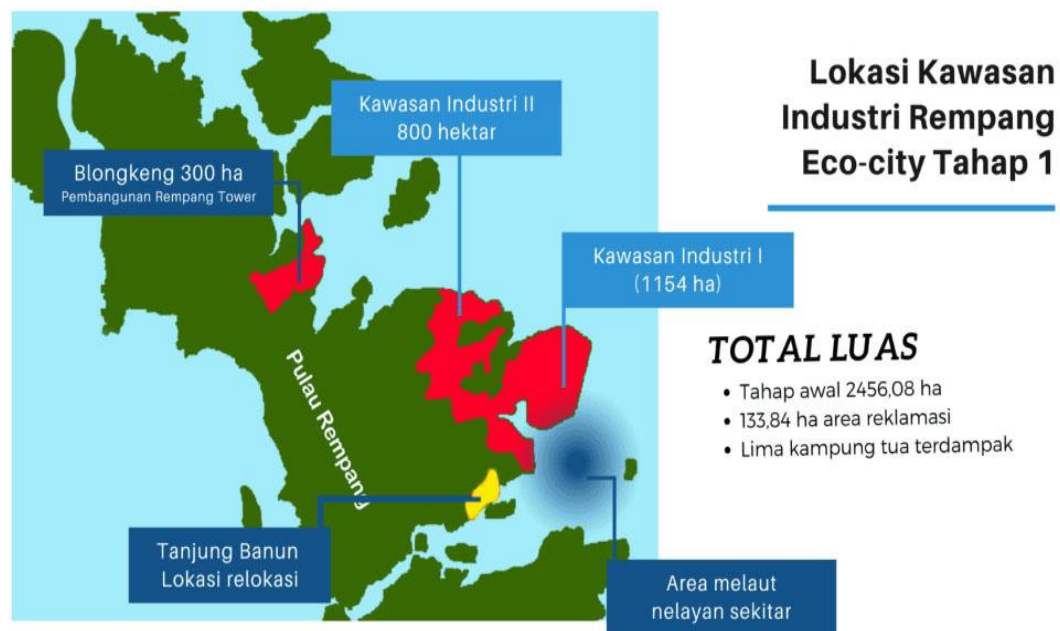
daerah (BP Batam, 2023).

Pulau Rempang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah otorita Batam. Penetapan tersebut diperkuat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa Pulau Rempang termasuk dalam kawasan usaha berikat (*Bonded Zone*). Status tersebut memberikan Rempang kedudukan strategis sebagai kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata (BP Batam, 2023). Pengembangan Pulau Rempang telah disepakati pada 26 Agustus 2004 melalui perjanjian antara PT Makmur Elok Graha, yang diwakili oleh Tomy Winata, dan Pemerintah Kota Batam untuk membangun Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Namun, pelaksanaannya sempat terhenti karena adanya dugaan praktik korupsi. Pada tahun 2023, PT Makmur Elok Graha kemudian mengaktifkan kembali proyek yang tertunda tersebut dengan nama Rempang Eco City (WALHI Riau, 2024).

Rempang Eco City merupakan program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Rempang, dengan fokus pengembangan pada sektor industri, perdagangan, dan pariwisata (Lubis et al., 2024). Program pembangunan ini merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, dan dikelola oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan nilai investasi sebesar Rp381 triliun. Sebagai bagian dari pelaksanaan proyek ini, pemerintah merelokasi Masyarakat Adat yang telah

lama bermukim di Pulau Rempang untuk pembangunan kawasan industri, termasuk pabrik kaca hasil kerja sama dengan Xinyi Group (Aldino et al., 2024).

Gambar 1.1 Peta Rencana Pembangunan Rempang Eco City



Sumber: Materi Konsultasi Publik Rencana Amdal di Camat Galang, Mongabay 2023.

Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16.583 hektare, di mana proyek Rempang Eco City merencanakan pengalihfungsian lahan seluas 8.142 hektare untuk dikembangkan sebagai kawasan terpadu. Kawasan tersebut terbagi ke dalam beberapa zona pengembangan, meliputi Zona 1 sebagai kawasan industri panel surya beserta fasilitas pendukung dengan luas sekitar 1.154 hektare, Zona 2 yang

diperuntukkan bagi pembangunan pabrik pengolahan alumina dan fasilitas pendukung seluas 800 hektare, serta Zona 3 yang mencakup kawasan perumahan, area golf, dan fasilitas komersial dengan luas sekitar 371,4 hektare. Pada tahap awal pelaksanaan proyek ini, terdapat lima kampung tua yang terdampak secara langsung, yaitu Kampung Blongkeng, Pasir Merah, Sembulang Hulu, dan Pasir Panjang (Mongabay, 2023).

Rempang Eco City dirancang sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Kawasan ini tidak hanya dikembangkan sebagai pusat kegiatan industri, tetapi juga diproyeksikan untuk mendukung sektor perdagangan, permukiman, serta pariwisata yang terintegrasi dalam satu kawasan pengembangan (BP Batam, 2024). Wilayah yang direncanakan untuk pengembangan Rempang Eco City merupakan kawasan permukiman adat yang terdiri dari 16 Kampung Tua. Masyarakat asli Pulau Rempang terdiri atas suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang diyakini telah menetap di wilayah tersebut sejak tahun 1834. Keberadaan suku Orang Darat di Pulau Rempang juga tercatat dalam berbagai arsip kolonial (Kompas, 2023).

Masyarakat Adat di Pulau Rempang selama ini menjalani mata pencaharian subsisten yang berbasis laut dan kebun, di mana mereka mendapat nafkah dari hasil tangkapan laut, kebun campuran, dan sumber daya hutan (Kompas, 2025). Fajriansyah (2025) menjelaskan bahwa Nelayan Rempang biasanya melaut sekitar 15 kali dalam sebulan. Dari aktivitas melaut ini, Nelayan Rempang dapat memperoleh pendapatan

rata-rata sekitar Rp 500.000 per hari atau sekitar Rp 7,5 juta per bulan. Pada musim ikan melimpah, penghasilan tersebut dapat meningkat menjadi Rp 3-4 juta dalam satu malam. Pendapatan itu masih bertambah melalui aktivitas menangkap kepiting bakau yang bernilai sekitar Rp 300.000 per kilogram, biasanya dalam sehari nelayan bisa mendapat dua ekor kepiting bakau. Sehingga, memberi tambahan sekitar Rp 600.000 perhari.

Saat tidak melaut, Masyarakat Adat Rempang beralih memanfaatkan hasil kebun seperti kelapa, pisang, durian, mangga, rambutan, sawo, matoa, dan kelengkeng. Di luar musim buah, masyarakat mengolah lahan untuk menanam berbagai komoditas seperti ubi, cabai, mentimun, kangkung, dan bayam. Dari hasil kebun dan ladang ini, penghasilan masyarakat Adat Rempang dapat mencapai Rp 7-8 juta per bulan. Secara keseluruhan, pendapatan masyarakat Adat Rempang dari sektor laut, perkebunan, dan pertanian dapat menghasilkan sekitar Rp 15 juta per bulan (Fajriansyah, 2025). Masyarakat Adat Rempang memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Adat Rempang memiliki ikatan yang kuat dengan tanah ulayat, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat (Harahap & Fahirin, 2024).

Rencana pembangunan Rempang Eco City memicu konflik antara Masyarakat Adat Rempang dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan. Pembangunan tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada realitas sosial

masyarakat Adat Rempang yang telah menetap secara turun-temurun, namun justru mengalami relokasi paksa, tekanan aparat, serta kehilangan hak atas tanah leluhur (Aritonang & Maheswara, 2023). Pengambilalihan lahan secara paksa yang memicu konflik agraria, sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem Pulau Rempang akibat pelaksanaan proyek Rempang Eco City . Di sisi lain, upaya masyarakat mempertahankan ruang hidupnya dari penggusuran yang dilakukan atas nama pembangunan yang diklaim ramah lingkungan, berkelanjutan, dan lestari justru berujung pada tindakan kriminalisasi terhadap warga yang menolak relokasi (Rohmawati, 2023)

Pada Kamis, 7 September 2023, terjadi bentrokan antara aparat gabungan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas pengamanan BP Batam, dan masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam. Kedatangan aparat bertujuan untuk melakukan pemasangan patok batas lahan sebagai bagian dari persiapan pembangunan Proyek Rempang Eco City. Upaya tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat yang melakukan aksi pemblokiran jalan dengan menebang pohon serta menempatkan kontainer di badan jalan untuk menghalangi akses aparat. Aparat kemudian berupaya membuka blokade tersebut dan melanjutkan pemasangan patok. Situasi semakin memanas ketika aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Semburan gas air mata bahkan mencapai area sekolah sehingga mengakibatkan guru mengevakuasi para siswa melalui pintu belakang demi menjaga keselamatan mereka. (Piratla & Yadollahi, 2023).

Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco City*, berupa kelalaian, penundaan berlarut, serta penyimpangan prosedur dalam perencanaan dan pengelolaan proyek, termasuk tidak jelasnya status hukum 16 Kampung Tua di Pulau Rempang dan belum terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sehingga relokasi Masyarakat Adat dianggap bermasalah secara legal (CNN Indonesia, 2023). Situasi ini mengakibatkan masyarakat Adat Rempang yang sebelumnya hanya menuntut tidak direlokasi dan diberi ganti rugi yang layak apabila tanahnya dipergunakan untuk proyek akhirnya juga menolak PSN Rempang *Eco-City* (Walhi Riau, 2024).

Status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco City* menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pendapat umum Komisi VI dengan masyarakat Adat Rempang, senin 28 April 2025. Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyatakan bahwa proyek Rempang *Eco City* tidak tercantum dalam daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rempang *Eco City* hanya tercantum dalam bagian pembangunan kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau (Tempo, 2023). Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad menegaskan bahwa perubahan status proyek Rempang *Eco City* dalam daftar PSN bukan berarti proyek tersebut dibatalkan, pelaksanaan dan proses pengembangan Rempang *Eco City* akan terus berjalan (Medianesia Batam, 2025).

Perubahan status Rempang *Eco City* dalam daftar PSN tidak menghentikan

pelaksanaan pengembangan kawasan maupun proses relokasi masyarakat adat. Proses relokasi tetap dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah, yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah warga yang telah berpindah ke kawasan relokasi Tanjung Banun. Rekapitulasi jumlah warga yang telah bergeser ke kawasan relokasi dan yang masih menempati hunian sementara hingga Agustus 2025 disajikan pada Tabel 1.1.

Table 1.1 Rekap Pergeseran Warga Hunian Sementara ke Tanjung Banun Bulan Agustus 2025

NO.	KETERANGAN	KK	JIWA
1.	Warga Yang Sudah Bergeser Ke Tanjung Banon	186 KK	664 Jiwa
2.	Warga yang Belum Bergeser (Hunian Sementara)	46 KK	148 Jiwa
JUMLAH		232 KK	812 Jiwa

Sumber Data: BP Batam 2025.

Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, hingga Agustus 2025 sebanyak 812 jiwa atau 232 kepala keluarga (KK) telah bersedia direlokasi ke kawasan hunian baru Tanjung Banon yang masih berada di Pulau Rempang dan berjarak sekitar tiga kilometer dari permukiman lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses relokasi masih berlangsung dan belum mencakup seluruh masyarakat terdampak. Sejalan dengan hal tersebut, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) melaporkan bahwa hingga saat itu masih terdapat sekitar 347 rumah tangga yang tetap bertahan di kampung asalnya. Rumah tangga tersebut tersebar di beberapa kampung, yaitu Pasir Panjang (112 rumah tangga), Sembulang Hulu (90), Belongkeng (60), Sembulang (20), dan Sembulang Pasir Merah (65) (Handitya, 2025).

Pasca relokasi proyek Rempang *Eco City*, masyarakat adat rempang yang sebelumnya menggantungkan hidup dari sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian harus menghadapi perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sebelum proyek berlangsung, Pulau Rempang berperan penting sebagai pemasok utama kebutuhan pangan bagi Kota Batam melalui hasil laut, sayuran, dan buah-buahan. Namun, setelah dipindahkan ke wilayah yang relatif sempit, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka, sehingga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bersaing memperebutkan sumber daya terbatas, dan sebagian bahkan terpaksa beralih menjadi pekerja proyek industri (Kompas, 2025).

Gambar 1.5 Spanduk Penolakan kelompok yang menolak Relokasi Rempang Eco City



Sumber: Dokumentasi CNN Indonesia 2024.

Kondisi yang terjadi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat adat yang direlokasi, tetapi warga yang direlokasi juga dilarang kembali ke kampung halaman oleh kelompok yang menolak relokasi. Masyarakat yang

menolak direlokasi memasang spanduk berisi kata-kata menolak untuk direlokasi dan melarang masyarakat yang ikut relokasi untuk kembali ke kampung lamanya (CNN Indonesia, 2024). Relokasi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan sosial dan kultural yang memadai dapat menimbulkan gangguan sistem sosial dan konflik horizontal di wilayah tujuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses relokasi yang tergesa-gesa dan minim partisipasi berpotensi menimbulkan resistensi sosial, kerentanan ekonomi, serta melemahkan kohesi sosial masyarakat di lingkungan baru (Marwanti, 2020).

Studi-studi terdahulu, mengenai ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan sosial dilakukan oleh Fahira Diandra Nuraidawati (2024). Penelitian tersebut menyoroti ketahanan sosial keluarga miskin selama pandemi Covid-19 dan menemukan bahwa tekanan ekonomi, kondisi psikososial, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang melemahkan ketahanan keluarga. Strategi coping yang muncul umumnya bersifat jangka pendek, seperti pengurangan pengeluaran, meminjam uang, dan mengandalkan bantuan pemerintah. Solidaritas sosial antarwarga membantu keluarga bertahan, namun penelitian menegaskan bahwa keluarga miskin tetap menjadi kelompok paling rentan dan membutuhkan dukungan struktural agar ketahanan sosial mereka tetap terjaga (Nuraidawati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun solidaritas sosial antarwarga berperan penting dalam membantu keluarga bertahan, keluarga miskin tetap berada pada posisi paling rentan dan memerlukan dukungan struktural yang berkelanjutan agar ketahanan sosial mereka dapat terjaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2016), mengenai ketahanan sosial masyarakat di Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan pembangunan, minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurang optimalnya penegakan hukum turut meningkatkan kerentanan sosial masyarakat setempat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan sosial bergantung pada sinergi berbagai modal, seperti modal sosial, politik, ekonomi, alam, dan manusia. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan sosial tidak hanya mencakup kemampuan bertahan, tetapi juga proses pemulihan, keberlanjutan, dan pertumbuhan komunitas dalam menghadapi ancaman.

Disisi lain penelitian Pramudya, Marwanti, dan Sundayani (2021) mengkaji ketahanan sosial Komunitas Adat Jalawastu di tengah perubahan sosial modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial komunitas adat tersebut tergolong kuat melalui tiga kapasitas utama: coping, yang tercermin dari mekanisme adat seperti musyawarah, gotong royong, dan solidaritas; adaptif, melalui kemampuan menyeleksi perubahan yang sesuai dengan nilai dan aturan adat; serta transformatif, yang mulai berkembang melalui pengelolaan hutan adat dan keterlibatan dalam berbagai program pemberdayaan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum merata akibat keterbatasan pemahaman dan migrasi generasi muda sehingga penguatan pada aspek regenerasi dan partisipasi tetap diperlukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menelaah secara mendalam bagaimana masyarakat adat bertahan dan menata kembali kehidupan sosial mereka

setelah mengalami relokasi, yang menitikberatkan pada tiga dimensi utama kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi (keck & sakdapolrak, 2013).

Ketahanan sosial secara konseptual menurut Leitch dalam Suwigyo dan Rhoma, (2018:96) dipahami sebagai kapasitas individu maupun kelompok untuk merespons perubahan secara tepat waktu dalam situasi stabil, sekaligus mampu beradaptasi, mengatur diri, dan tetap aktif menghadapi kondisi yang tidak menentu. Menurut Betke dalam Marwanti dkk, (2017:283) ketahanan sosial juga merupakan suatu proses ketika komunitas mampu mengelola dirinya secara kolektif untuk menghadapi kesulitan, mempertahankan keberlangsungan hidup, dan tetap memberikan kontribusi bermakna bagi lingkungan sosialnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa ketahanan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatasi persoalan dan beradaptasi, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam merespons perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketahanan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat menghadapi kondisi krisis seperti bencana alam, konflik sosial, maupun krisis ekonomi ketahanan sosial berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kohesi sosial, memungkinkan individu dan kelompok untuk tetap solid dan saling menopang. Tanpa adanya ketahanan sosial yang kuat, suatu komunitas akan menjadi lebih rentan terhadap perpecahan, disintegrasi sosial, bahkan keruntuhan sistem sosialnya (Zhong dkk., 2020).

Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana ketahanan sosial masyarakat adat Rempang pasca relokasi dalam menghadapi tekanan sosial ekonomi akibat pembangunan Rempang *Eco City*. Fokus penelitian tidak hanya terletak pada sejauh mana masyarakat mampu bertahan dari perubahan tersebut, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi serta bertransformasi secara sosial dan kultural untuk membangun kehidupan baru yang berkelanjutan. Dari latar belakang dan permasalahan di atas maka peneliti ini mengambil sebuah judul penelitian yaitu "Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Pasca Relokasi Proyek Rempang Eco City di Kota Batam".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini kemudian merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu Bagaimana Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Pasca Relokasi Proyek Rempang Eco City di Kota Batam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Pasca Relokasi Proyek Rempang Eco City di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan informasi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan serupa, sekaligus berfungsi sebagai referensi pustaka dalam memenuhi kebutuhan kajian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian yang bersifat sosiologis

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan relokasi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan gambaran nyata mengenai dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami masyarakat sehingga kebijakan ke depan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi adaptasi yang efektif dalam menghadapi relokasi dan perubahan sosial, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan sosial melalui solidaritas internal dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.